



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 897/I/III/2016

OSIS ANDIL CEGAH BAHAYA NARKOBA & KORUPSI



PARIPURNA DPR SETUJUI
**KERJA SAMA PERTAHANAN
INDONESIA-CHINA**



TIFATUL HARAPAN
BANK BUMN BERLAKU
ADIL PADA MASYARAKAT
KELAS BAWAH



PENTINGNYA BOPTN
UNTUK MENUNJANG
PENDIDIKAN



Jangan Lewatkan info DPR terkini
dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

OSIS ANDIL CEGAH BAHAYA NARKOBA & KORUPSI

Osis atau organisasi intra sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan sosialisasi pencegahan sejak dini bagi generasi muda akan bahaya penyakit sosial, terutama bahaya narkoba dan bahaya korupsi. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Ade Komarudin saat menerima Ikatan Osis Nasional (IONAS), Kamis (3/3) di gedung Nusantara, Senayan Jakarta.

"Saat ini Indonesia sedang berada dalam bahaya narkoba dan bahaya korupsi. Disinilah peranan atau tugas utama dari Osis, yakni melakukan sosialisasi pencegahan terhadap kedua penyakit tersebut, sekaligus sebagai contoh baik bagi siswa dan generasi muda lainnya,"ungkap Ade.

Di tengah-tengah anggota IONAS dari beberapa daerah tersebut, Akom, begitu wartawan biasa menyapanya, juga menceritakan pengalaman hidupnya hingga duduk sebagai Ketua DPR RI. Dikatakannya, Osis tidak hanya sebagai organisasi atau perkumpulan ekskul (ekstrakurikuler) semata, melainkan juga

sebagai sebuah ajang pembinaan bagi para calon pemimpin. Ia menyontohkan dirinya yang sejak SMP dan SMA menjadi pengurus bahkan sempat beberapa periode terpilih menjadi Ketua Osis.

"Saat masuk menjadi pengurus dan akhirnya terpilih jadi Ketua Osis, saya sangat merasakan manfaat dari kesertaan di Osis, terutama dalam hal kepemimpinan. Hal itu jugalah yang semakin memantapkan keinginan saya untuk menjadi seorang politisi,"ujar Akom sambil berharap IONAS dapat lebih melebarkan lagi keanggotaannya.

Tidak hanya itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengisahkan perjuangannya ke sekolah yang harus berjalan kaki sejauh 7,5 KM, dan melewati pematang sawah. Saat hujan tiba, ia menjinjing sepatunya. Namun semua itu tak menyurutkan semangat Akom untuk terus maju, hingga ia berhasil menyelesaikan program doktoralnya dari Universitas Padjajaran dengan IPK (indeks prestasi kumulatif) 4,0.

Pada kesempatan itu Akom juga

menjelaskan seputar parlemen, termasuk tiga fungsi DPR RI yakni legislasi, *budgeting* (anggaran) dan *controlling* atau pengawasan. Hal itulah yang kemudian memancing pertanyaan dari para siswa yang jumlahnya nyaris mencapai seratus orang itu.

Azlia, peserta dari Lampung misalnya, mempertanyakan peran dan tugas dari Komisi X yang notabene membidangi masalah pendidikan dan budaya. Sementara itu Selfa, mempertanyakan Tips memimpin ditengah-tengah orang-orang yang berseberangan dengan dirinya.

"Komisi X membidangi masalah pendidikan, olahraga dan budaya. Komisi X lah yang memberikan persetujuan anggaran dan program-program yang akan dijalankan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai mitra kerjanya. Tidak hanya itu Komisi X juga mengawasi mitra kerjanya itu apakah program yang dijalankan sudah sesuai peruntukannya," jelas Akom.

Sementara itu, terkait dengan tips atau kiat dalam memimpin, ia mengaku harus konsisten dengan segala apa yang diucapkan. Selain itu, lanjut Akom, untuk menjadi pemimpin setiap orang harus terus belajar dan banyak membaca. Karena buku atau bacaan adalah sumber ilmu. *(ayu) foto: jaka, kresno/parle/hr.*



Ketua DPR RI Ade Komarudin



AGUS HERMANTO DUKUNG Percepatan Pembangunan Bandara Kulon Progo



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Agus Hermanto meninjau Bandar Udara Kulon Progo, yang rencananya sebagai pengganti Bandara Adisucipto, dan akan memiliki konsep sebagai bandara berskala internasional.

"Kunjungan ini untuk mengakomodir dan bentuk dukungan DPR terhadap pembangunan Bandar Udara Internasional Kulon Progo guna mencapai target *groundbreaking* pada Mei 2016 dan operasi bandara pada tahun 2019, sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi perekonomian masyarakat Yogyakarta," kata Agus Hermanto, yang didampingi Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, dan Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu, di Yogyakarta, Rabu (2/3/2016).

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, Bandara ini rencananya akan memiliki fasilitas intermoda berupa

lajur khusus kereta api yang bisa mengakses langsung area bandara.

Dengan konsep skala internasional ini diharapkan bandar udara Kulon Progo dapat melayani rute-rute internasional menuju Yogyakarta.

Berdasar data yang diterima, masih terjadi permasalahan dalam hal pembebasan lahan, ini merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi tiap pembangunan bandara baru ataupun perluasan bandara.

"Untuk itu, kepada pemangku kepentingan harus disosialisasikan agar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memahami betul bahwa proyek ini untuk kepentingan daerahnya, bukan untuk Angkasa Pura semata. Dan relokasi warga yang terkena dampak rencana pembangunan bandara harus terwujud tanpa beban apapun kepada masyarakat," paparnya. *(as) foto: agung sulistiono/parle/hr.*



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastuti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmad Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

SIRKULASI

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

Email

penerbitandpr@gmail.com

(isi berita dan materi foto
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)



FORUM GURU BESAR HARAPKAN REVISI UU KPK DITARIK DARI PROLEGNAS



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aspirasi para Guru Besar dari sejumlah perguruan tinggi terkait permintaan untuk menarik revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 - 2019.

"Kami menerima aspirasi Guru Besar dan akan kami serahkan ke Rapim dan

kesempatan itu, Perwakilan guru besar Asep Saefuddin memberikan surat pernyataan sikap resmi para Guru Besar. Termasuk tanda tangan sekitar 158 Guru Besar yang meminta revisi UU KPK ditarik dari Prolegnas.

Menurut Saefuddin, upaya melakukan revisi terhadap UU KPK merupakan langkah yang tidak tepat. Ada empat poin perubahan dalam draf revisi UU No 30

Fraksi - fraksi di Bamus dan pihak terkait di Badan Legislasi untuk tidak disikapi," ujar Fadli saat menerima audiensi Guru Besar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/03/2016).

Dalam

tahun 2002 tersebut melemahkan KPK bukan memperkuat seperti yang disampaikan oleh pemerintah.

Disamping itu, Saefuddin menambahkan, kepercayaan publik terhadap KPK juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga lain. Dan realitas praktik korupsi di Indonesia masih memprihatinkan, mengingat Indonesia berada pada peringkat 88 dari 168 negara dalam daftar peringkat korupsi dunia tahun 2015.

"Negara kita masih rentan dengan persoalan korupsi, alangkah naifnya kalau terjadi pelemahan KPK. Di satu pihak kita memerlukan suatu lembaga yang kuat," jelas Saefuddin.

Menanggapi hal itu Fadli Zon mengatakan bahwa penarikan draf RUU masih memungkinkan, namun perlu persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. "Kalau ini minta ditarik dari prolegnas prioritas 2016 maupun long list di 2015 - 2019 perlu ada proses baru di Baleg untuk diusulkan kemudian ditarik," papar Fadli. (ann,mp) foto: runi/parle/hr.

DPR HARUS BEDA Mekanisme Kerja dengan Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mendorong DPR sebagai tulang punggung demokrasi untuk memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan lembaga eksekutif. Hal itu disampaikannya usai Rapat Presentasi dengan Tim Implementasi Reformasi DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Selasa (01/03/2016).

"Ini harus dijelaskan ulang kepada masyarakat bahwa yang sedang dibangun ini adalah tulang punggung demokrasi dan

tulang punggung pilihan politik, karena bangsa Indonesia menganut prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, kamar legislatif itu berbeda dengan eksekutif. Kita tidak berpersepsi seperti pemerintahan otoriter yang mengatakan legislatif tidak penting," tegas



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan Tim Implementasi Reformasi DPR

Fahri.

Politisi F-PKS itu menambahkan, peran legislatif untuk melakukan pengawasan kepada rakyat itu juga penting. Karena hal ini merupakan pekerjaan yang semakin



besar, DPR harus punya sistem kerja sendiri.

"Kalau di eksekutif ngurus otot. Nah, kalau di legislatif ngurus otak, karena disini banyak perdebatan. Setiap orang memiliki perbedaan pendapat dan itu rumit dikelolanya," sambung politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu.

Untuk itu, Fahri juga berharap bahwa kamar legislatif memiliki undang-undang sendiri. Dengan begitu, nantinya DPR, MPR dan DPD, masing-masing memiliki undang-undang. Termasuk untuk *supporting system*-nya.

"Sama dengan sistem pendukungnya, yakni Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR. Nah ini kita buat secara independen," tegas Fahri yang turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menegaskan bahwa karakteristik Sekretariat Jenderal DPR RI harus dinamis, tidak bisa statis dan tidak boleh birokratis.

"Inilah yang sedang dibangun. Dan teman-teman ini sedang berubah ke arah sana serta berikhtiar untuk berakselerasi. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar," harap Fahri.

Dalam rapat ini, hadir juga Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk dan Deputy Bidang Persidangan DPR RI Damayanti beserta jajarannya. *(hs,sf,nt)*.

Komisi III Soroti HUBUNGAN KY DENGAN MA

KOMISI III DPR RI menyoroti hubungan Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) yang belakangan terkesan kurang harmonis. Hal tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi Komisi III dengan KY, Rabu (2/3) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.

"Dalam laporan KY disebutkan bahwa selama ini pengelolaan manajemen hakim dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung dan terbukti belum optimal. Jangan sampai hal itu menjadi sebuah sinyalemen yang semakin menjauhkan KY dan MA seperti yang diberitakan media massa," ujar anggota Komisi III, Achmad Zacky Siradj.

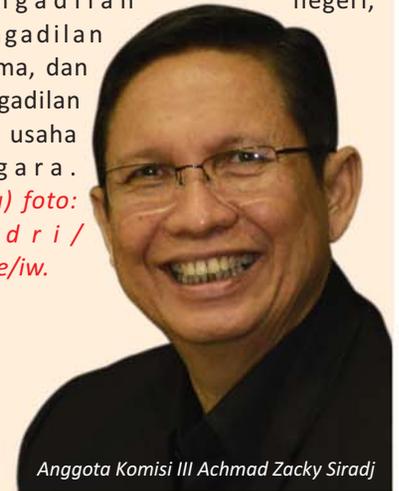
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana yang melihat kedua lembaga ini (KY dan MA) saling menyalahkan. Sejatinnya kedua lembaga itu dapat saling bersinergi untuk menegakan keadilan.

Oleh karena itu seluruh anggota dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan ini berharap agar KY dapat menjaga kehormatan, martabat dan nilai

luluh hakim, sekaligus mampu bersinergi dengan Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan utama menegakkan keadilan.

Sebagaimana diketahui ketidak harmonisan KY dan MA ini terjadi saat pengangkatan calon hakim agung dan putusan KY yang kerap tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi 7 Oktober 2015 KY sudah tidak lagi terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim pada pengadilan negeri,

pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. *(ayu) foto: andri/parle/iw.*



Anggota Komisi III Achmad Zacky Siradj

DIUNDANG KE PAGELARAN BUDAYA, FADLI ZON DUKUNG KEGIATAN BUDAYA NUSANTARA



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (1/3), menerima putra mahkota Puri Ageng Blahbatu Anak Agung Kakarsana, kedatangan Kakarsana dalam rangka mengundang Fadli Zon untuk menghadiri acara Bakti Karya Nusantara ke- III pada 5 Maret mendatang di Puri Ageng Blahbatu, Gianyar, Bali.

"Saya diundang untuk hadir di Puri Ageng Blahbatu di Bali, untuk satu acara Bakti Karya Nusantara, ini saya kira suatu kegiatan budaya yang sangat penting, dan saya dengan senang hati mendukung dan menyambut kegiatan-kegiatan budaya ini,"kata Fadli usai pertemuan.

Ditambahkan Fadli, dirinya merencanakan akan datang, apalagi kegiatan budaya seperti ini, adalah benteng pertahanan terakhir bangsa Indonesia, sebagai identitas dan jati diri bangsa di era globalisasi.



Sementara itu, Anak Agung Kakarsana menerangkan, bahwa dirinya mewakili keluarga besar Puri Ageng Blahbatu mengharapkan sekali kehadiran dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon, karena selain ritual acara tersebut, terang Kakarsana, rencananya akan diberikan penghargaan kepada Fadli Zon sebagai salah satu tokoh penerima simbol Maha Patih Gajah Mada selaku salah satu pengabdian bangsa.

Acara Bakti Karya Nusantara ini, jelas Kakarsana, merupakan prosesi sakral, yang bertujuan mengambil semangat Patih Gajah Mada yaitu pemersatu bangsa.

"Prosesi sakral ini juga dihadiri sejumlah tokoh spiritual Bali, pejabat, baik dari pusat maupun daerah, untuk sama-sama berdoa, supaya pemerintahan kita kedepan lebih terjalin sinergitas yang baik dan harmonis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,"ujarnya

Kakarsana yang juga selaku Ketua Panitia acara tersebut.

Terkait pemberian penghargaan, Fadli Zon mengungkapkan, dirinya menyampaikan ucapan terima kasihnya, "Kalau memang itu (penghargaan-red) ada, saya berterima kasih, tapi pada intinya, seni merupakan bagian yang terpenting, dan apapun bentuk kegiatan kebudayaan dalam rangka memeriahkan, tentunya saya ikut mendukung,"kata Fadli yang juga turut andil dalam usaha pelestarian dan pengembangan seni di Nusantara.

Sebelumnya Bakti Karya Nusantara pertama kali diadakan pada tahun 2010, selanjutnya ditahun 2012, dan 2016 ini adalah kegiatan yang ke tiga, Prosesi ini tidak bisa ditentukan waktunya, karena ini disesuaikan dengan kesepakatan dari pihak Puri Ageng Blahbatu. (nt) foto : hamdis/parole/hr.

pemerintah sebagai pemangku kepentingan dari UU yang disahkan berlangsung tanpa ada perdebatan sengit.

Saat Pimpinan Sidang menanyakan kepada seluruh dewan yang hadir, tidak ada yang mengeluarkan interupsi penolakan. "Untuk selanjutnya kami akan menanyakan satu per satu kepada tiap-tiap fraksi apakah, RUU tentang nota kesepahaman MoU antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai kerjasama di bidang pertahanan, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Fadli Zon.

Para dewan yang hadir menjawab "sah" dan sebagian menjawab "setuju," dengan ini maka Pimpinan Sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan undang-undang yang dibahas.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung menyampaikan, bahwa rapat paripurna ini berdasar keputusan Rapat Bamus DPR tanggal 14 Januari 2016 yang menugaskan Komisi I DPR untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut bersama-sama dengan Pemerintah.

"Menindaklanjuti penugasan rapat Bamus tersebut, rapat intern Komisi I DPR tanggal 27 Januari 2016, memutuskan bahwa Komisi I DPR melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut," ujar Asril saat membacakan laporannya di hadapan Rapat Paripurna.

Asril yang memiliki latar belakang karir di bidang militer sebagai Mayjen TNI berargumen, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara.

"Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan,"tegasnya.

Dewan dari dapil DKI Jakarta I ini melanjutkan, untuk itu, kerjasama pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia.

PARIPURNA DPR SAHKAN KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN PEMERINTAH JERMAN

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/3), telah mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang tentang nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai kerjasama di bidang pertahanan.

Sidang dewan kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI yang membidangi urusan pertahanan nasional, Fadli Zon didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 322 anggota DPR dengan kehadiran perwakilan seluruh fraksi ini bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan beberapa lembaga perwakilan



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin sidang paripurna



"Di samping itu, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antara negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara," tambahnya.

Asril juga mengharapkan dengan

disahkannya RUU ini, peran pemerintah bersama DPR selaku lembaga legislatif untuk menjaga mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berpartisipasi menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi," harapnya. *(eko,nt)*

foto: tim parle/hr

PARIPURNA DPR SETUJU KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-CHINA

WAKIL Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung dalam laporan yang dibacakannya di depan Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (1/3) mengatakan bahwa aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya.

Untuk itu dikatakan politisi dari Fraksi Partai Gerindra, kerjasama pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Disamping itu kerjasama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

"Oleh karena itu kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini agar dapat mensahkan RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan untuk dapat disahkan menjadi undang-undang," ujar Asril.

Teriakan setuju dari seluruh peserta Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menjadi tanda disetujuinya laporan pimpinan Komisi I tersebut.

Sebagaimana mekanisme di DPR RI, sebelum masuk dalam pembicaraan

PARIPURNA SETUJU RUU Kewirausahaan Nasional sebagai Hak Inisiatif DPR



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin sidang paripurna

RAPAT Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Agus Hermanto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang - Undang Kewirausahaan Nasional menjadi hak inisiatif DPR RI. RUU Kewirausahaan Nasional merupakan *carry over* dari Prolegnas 2015.

"Apakah usul inisiatif anggota DPR RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat disetujui menjadi rancangan undang - undang usul DPR RI?" tanya Fadli kepada anggota dewan saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (01/01/2016).

"Setuju..." jawab anggota dewan, dan

palu pun diketuk tanda persetujuan. Saat ini, regulasi mengenai kewirausahaan masih tersebar dalam pelbagai peraturan perundang - undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif. Diharapkan dengan lahirnya RUU Kewirausahaan Nasional ini mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyampaikan persetujuannya terhadap Rancangan Undang - Undang tentang Kewirausahaan Nasional disertai penyerahan pandangan mini fraksi secara tertulis. *(ann,mp) foto: tim*



Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung dan Pimpinan DPR

tingkat II/Pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI, RUU tersebut juga telah melalui pembahasan baik lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi. Baru kemudian dibahas dalam pembicaraan tingkat I yang akhirnya dalam pembicaraan tersebut seluruh fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintahan menyepakati RUU tersebut untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat selanjutnya, yakni tingkat II/pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. (Ayu) foto: tim fotografer/hr

DPR HARUS BERSIH DARI NARKOBA

WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto mengatakan bahwa wakil rakyat di parlemen harus bersih dari narkoba. Dirinya juga menyetujui usulan dilakukan test urine bagi seluruh anggota DPR RI. Hal itu disampaikan saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (29/02).

Terkait test urine, politisi Partai Demokrat itu juga menyatakan kesiapannya untuk dilakukan kapan saja atau hari ini juga. "Nanti kalau memang ada permintaan secepatnya, saya juga sudah mendengar yang ingin melaksanakan tes urine untuk mengetahui masalah narkoba kepada dewan, kalau saya siap. Kapan? Hari ini saya juga siap," ujar Politisi asal Dapil Jawa Tengah I ini.

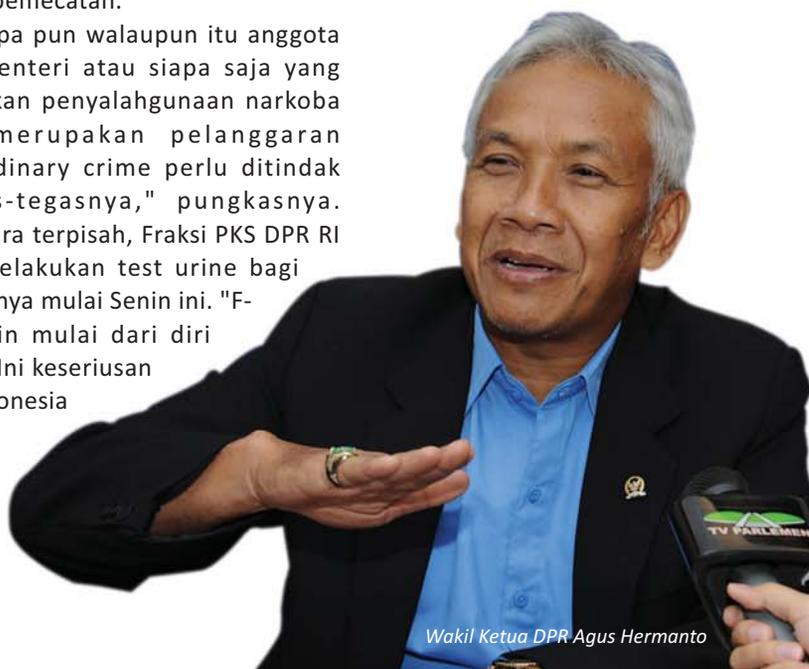
Hal ini penting untuk memberikan jaminan bahwa anggota DPR sebagai wakil masyarakat bersih dari narkoba. "Ini bisa memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat, karena untuk menjaga amanah rakyat itu harus bersih dari narkoba," tuturnya.

Agus juga mengatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memberikan sanksi jika ada anggota DPR yang terbukti meyalahgunakan narkoba. Hal ini terkait adanya salah satu anggota DPR yang diduga menggunakan narkoba. Pimpinan DPR pun mendukung kasus itu diusut. Bahkan sanksi berat juga dimungkinkan yakni berupa pemecatan.

"Siapa pun walaupun itu anggota DPR, Menteri atau siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang merupakan pelanggaran extraordinary crime perlu ditindak setegas-tegasnya," pungkasnya.

Secara terpisah, Fraksi PKS DPR RI telah melakukan test urine bagi anggotanya mulai Senin ini. "F-PKS ingin mulai dari diri sendiri. Ini keseriusan agar Indonesia b e b a s

narkoba karena bagaimana mungkin kita teriak-teriak kalau tidak mulai dari diri sendiri," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini, sesuai menjalani tes urine. Keseluruhan sudah 40 anggota DPR Fraksi PKS dan 24 tenaga ahli yang menjalani tes urine. (hs.mp) foto:iwan armanias/parle/hr.



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, kalau ada keberatan dengan disahkannya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maka salurannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya DPR siap menghadapi gugatan. " Karena sudah menjadi undang-undang DPR harus siap, karena kami yakin UU Tapera sangat bagus, dan menunjukkan keberpihakan DPR kepada masyarakat menengah kebawah," katanya saat ditanya pers Senin (29/2).



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

DPR SIAP HADAPI Gugatan UU Tapera

Pimpinan DPR dari Fraksi Demokrat ini mengatakan, UU Tapera ini fokusnya memperjuangkan masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah. Kepada pengusaha perumahan atau pengembang, perlu ada pembicaraan yang serius ketat, karena ini hakekatnya adalah UU ini memberi kemanfaatan bagi masyarakat menengah kebawah.

"Kami juga mengakui bahwa perusahaan juga mempunyai kepentingan yang lebih tinggi, kenapa kepentingan itu kita gabung sehingga menjadi lebih baik. Saya kira perlu sosialisasi dan penjelasan kepada Apindo termasuk pengusaha perumahan sehingga ada *resultante* yang sangat baik," ungkapny.

Memang kata Agus Hermanto, dalam UU itu ada klausul bahwa perusahaan membantu perumahan bagi karyawannya. "Ini sesuatu yang bisa kita bicarakan sehingga bisa dilaksanakan lebih fokus, membantu perumahan bagi karyawan menengah kebawah," ia menambahkan.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah bulat akan menggugat Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, pihaknya akan mengajak serikat pekerja menindaklanjuti rencana gugatan tersebut. Bukan tak mungkin, pengusaha dan serikat pekerja bersama-sama menggugat UU Tapera. (mp) foto : *jaka/parle/hr.*

TIFATUL HARAPKAN BANK BUMN BERLAKU ADIL PADA MASYARAKAT KELAS BAWAH

Anggota Komisi VI DPR-RI Tifatul Sembiring mempertanyakan perlakuan ketidakadilan Bank-Bank dibawah naungan BUMN kepada kalangan masyarakat bawah. Menurutnya banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha dan sebagainya dari Bank, namun para pelaku perbankan memberikan syarat pinjaman dengan ketentuan sangat umum.

"Itu pertanyaan inti saya adalah masalah keadilan, ukuran standarnya bagaimana mengukur orang yang diberi pinjaman standarnya bagaimana, sama atau beda," kritis Tifatul dalam RDP Komisi VI DPR dengan Deputi bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan BUMN dan Dirut PT Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BRI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (1/3).

Dalam komentarnya, Tifatul yang merupakan Anggota Dewan dari dapil Sumatera Utara I ini, seakan menunjukkan

keraguannya pada pelaku perbankan di bawah naungan BUMN untuk berpihak pada masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengharapkan, agar Bank-Bank BUMN dapat bijaksana menghadapi masyarakat kelas bawah, karena menurutnya ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan nasional.

"Untuk Bank BRI yang memiliki cabang banyak sampai ke daerah-daerah terpencil dan desa-desa harus bisa melayani rakyat dengan baik," tegasnya

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berargumen, meskipun pelaku usaha perbankan memiliki orientasi *business to business* namun aspek keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah harus diutamakan.

"Karena masyarakat ini di samping dia

tidak punya modal, mereka juga tidak banyak paham tentang sistem perbankan oleh sebab itu harus mengutamakan masyarakat bawah," pinta Tifatul kepada Dirut Bank BUMN. (eko, nt) foto: *jaka*



Anggota Komisi VI DPR Tifatul Sembiring



PENTINGNYA BOPTN UNTUK MENUNJANG PENDIDIKAN

Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menegaskan, Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan hal yang penting untuk menunjang pendidikan tinggi. Dengan adanya BOPTN, dapat menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi, dengan tidak adanya kenaikan uang kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN. Sehingga, jika ada penurunan BOPTN, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap besaran UKT.

Demikian ditegaskannya saat bertemu dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, BEM Universitas, BEM Fakultas atau Jurusan Dosen-dosen Uninvestitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung, Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (Polman Bandung), Direktur Politeknik Negeri Bandung (Poltek Bandung) Rektor UPI, Rektor Unsil dan Rektor STSI di Gedung Rektorat ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/02/2016) lalu. Kunjungan spesifik ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR,

Ferdiansyah (F-PG).

"BPOPTN ini dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk menunjang pendidikan ini. Tapi kalau misalnya BPOPTN ini besarnya semakin berkurang, dikhawatirkan Uang Kuliah Tunggal itu yang meningkat. Memang kita harus bicarakan ini dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi," kata Dwita.

Politisi F-Gerindra ini juga khawatir, jika besaran BOPTN turun atau tidak sesuai dengan kebutuhan PTN, akan mengganggu proses belajar mengajar. Belum lagi, akibatnya adalah UKT yang meningkat, hal itu akan membebani mahasiswa dan orang tuanya. Ia juga tak memungkiri, bahwa selama ini telah menerima banyak keluhan dari beberapa PTN terkait implementasi BOPTN itu.

"Untuk revisi mengenai besaran BOPTN di tahun anggaran 2016 ini, akan kita bahas pada Mei nanti. Untuk revisi, kemungkinan kita meminta masukan-masukan dari berbagai pihak selaku pengguna BOPTN, yaitu perguruan-perguruan tinggi. Untuk kita minta masukkan, sebenarnya bagaimana kondisi penurunan anggaran ini," jelas Dwita.

Namun, tambah politisi asal dapil Lampung II itu, ia tidak memaksakan untuk menambah anggaran BOPTN jika memang anggaran negara tidak ada. Hal ini merupakan wewenang Pemerintah. Ia pun memastikan, berbagai masukan terkait permasalahan BOPTN ini akan dibahas dengan Menteri terkait pada saat rapat kerja.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Ferdiansyah, mengatakan

bahwa kunjungan ini terfokus pada pelaksanaan BOPTN, Beasiswa dan Kepangkatan Dosen. Sehingga pihaknya menggali dan menyerap aspirasi tentang berbagai persoalan dan tantangan yang mengemuka dalam persiapan dan pelaksanaan kebijakan dari Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat tentang BOPTN.

"Sesuai dengan alokasi dana BOPTN harus tetap diadakan karena amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, walau setiap tahunnya harus selalu meningkat seiring dengan peningkatan anggaran fungsi pendidikan, disamping itu total pagu BOPTN dalam APBN TA 2016 sekurang-kurangnya sama dengan APBN Perubahan TA 2015, dan BOPTN pada masing-masing PTN sekurang-kurangnya sama dengan BOPTN yang diterima pada APBN Perubahan tahun 2015," papar politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana data yang didapatkan Komisi X DPR, dana BOPTN yang diterima Unpad pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 24 miliar, kemudian ada peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp. 112 miliar. Namun mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi Rp. 97 miliar dan di tahun 2016 sebesar Rp. 87 miliar.

Permasalahan yang dihadapi oleh Unpad terkait dana BOPTN adalah dengan bertambahnya mahasiswa yang membayar UKT yang sebesar Rp. 12,5 juta per mahasiswa, menyebabkan turunnya jumlah mahasiswa. Kendala lain adalah ketidaktepatan waktu realisasi dan pemanfaatan dana BOPTN yang terlalu rigid, padahal diperlukan dana untuk inovasi.

Sementara untuk ITB, mendapat alokasi dana BOPTN tahun 2013 sebesar Rp 176,8 miliar, dengan realisasi 70-80 persen dari anggaran. Pada tahun 2014, dana BOPTN yang diterima sebesar Rp 165 miliar dengan realisasi 85 persen. Sedangkan tahun 2015, ITB menerima dana BOPTN sebesar Rp 233 miliar dengan realisasi 100 persen dan 2016 sebesar Rp 217 miliar. (hr,sf,nt) foto: Eka Hindra/parle/hr



Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi



PANITIA Khusus Angket Pelindo II DPR RI dipimpin Rieke Diah Pitaloka mengadakan kunjungan lapangan menemui masyarakat yang terkena proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru, Tanjung Priok, Senin (29/02/2016).

"Hari ini merupakan penentuan bagi kami apakah diteruskan atau dihentikan. Mudah - mudahan pertemuan hari ini membuka secercah harapan baru yang sudah 20 tahun kami nantikan," papar perwakilan warga ex-koja utara saat bertemu dengan Pansus Pelindo.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) menemukan dua permasalahan terkait proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru. "Diantaranya, peninggalan sengketa lahan Koja yang terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu dan juga persoalan ganti rugi lahan kepada warga Kalibaru yang dijanjikan akan diproses pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini belum terselesaikan sementara proyek tetap berjalan," jelas Rieke.

Anggota Pansus Pelindo II Irmadi Lubis (F-PDIP) berpendapat bahwa persoalan ganti rugi lahan sebaiknya dibawa ke Kementerian BUMN selaku wakil pemerintah serta pemegang saham. "Yang perlu kita ketok ini adalah *goodwill* dari Menteri BUMN, gak ada gunanya kita ke Pelindo karena mereka akan berkilah untuk menutupi yang di belakang," ungkap politisi dari dapil Sumatera Utara itu.

Sedangkan di tempat yang berbeda, Lurah Kalibaru menyatakan sampai saat ini ada tiga RW yang akan dibebaskan terkait rencana pembangunan pelabuhan

PANSUS PELINDO KUNJUNGI WARGA Korban Proyek Terminal Koja dan Kalibaru



Tim PANSUS Angket Pelindo II

terbesar se-Asia. Menurutnya, satu dari tiga RW sudah pada tahap appraisal harga, namun sampai saat ini belum ada musyawarah antara warga dan Pelindo.

Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus Pelindo Irma Suryani berpendapat seharusnya pemerintah mengedepankan kesejahteraan masyarakat. "Yang terpenting adalah proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru apakah menguntungkan rakyat. Kalau tidak menguntungkan untuk apa, institusi kita kan jelas mengatakan bumi, tanah air dan segala isinya dikelola oleh negara, bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," paparnya.

Politisi yang juga pernah menjadi karyawan JICT ini meminta semua data atau informasi terkait kronologi pembangunan terminal Koja - Kalibaru dan berjanji akan memfasilitasi untuk disampaikan kepada komisi terkait. "Secara berkesinambungan dan komprehensif akan kita selesaikan bersama - sama," ujar Irma. Sebelumnya, perwakilan warga Koja dan Kalibaru sudah pernah bertemu dengan RJ Lino Dirut Pelindo II, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM namun tidak mendapat respon yang baik dari institusi tersebut.

(ann,mp) foto: arif



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

BKSAP DPR APRESIASI **INOVASI PARIWISATA BANYUWANGI**

INOVASI pembangunan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat apresiasi dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Selain bervisi lingkungan, sektor pariwisatanya juga sangat memberdayakan masyarakat.

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang memimpin delegasi ini,

memuji semua yang sudah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Capaian pembangunan berkelanjutan terutama di sektor pariwisata sangat membanggakan. "Saya terkejut Banyuwangi sudah bisa meninggalkan Kota Malang dalam beberapa capaian," katanya.

Dalam pertemuan di Pendopo



Pemkab Banyuwangi, Senin (29/2), Nurhayati sangat memuji program Sedekah Oksigen yang digulirkan sang Bupati. Program tanam satu pohon setiap orang berjalan sangat baik di setiap instansi dan perumahan. Dari satu pohon itu bisa menyumbangkan oksigen bagi dua orang.

Dalam sambutannya, Nurhayati menjelaskan, BKSAP telah membentuk PANJA SDGs (Sustainable Development

Goals) untuk melihat capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. "Dengan Panja ini, kami ingin melihat pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan hidup. Dan sedekah oksigen adalah inovasi yang luar biasa," ujar Anggota F-PD itu.

Bupati Banyuwangi sendiri mengungkapkan, selain program sedekah oksigen, ada juga program toilet bersih dan kursus tiga bahasa asing di desa-desa

secara gratis. Ketiga bahasa itu adalah Inggris, Mandarin, dan Arab. Program kursus bahasa asing ini untuk menyambut pemberlakuan MEA.

Di Banyuwangi sendiri, lanjut Azwar Anas, angka kemiskinan terus menurun dari 20 persen menjadi tinggal 9,2 persen saja. Pendapatan per kapita penduduknya juga naik dari Rp14,7 juta per tahun menjadi Rp33,4 juta per tahun. (mh) foto: husen/parle/hr.

BALEG TUNTASKAN HARMONISASI RUU ARSITEK

BADAN Legislasi (baleg) DPR RI berhasil menuntaskan harmonisasi Rancangan Undang - Undang Arsitek. Seluruh fraksi di badan legislasi DPR bersepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Arsitek.

"RUU Arsitek sudah selesai diharmonisasi di Baleg, ini merupakan undang - undang yang sangat penting karena kita sekarang sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)," kata Wakil Ketua Baleg DPR dan juga Ketua Panja RUU Arsitek Totok Daryanto dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (29/02/2016).

Menurut politisi PAN dari dapil Jatim V itu, selama ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri namun tidak mendapatkan perlakuan profesional yang sama seperti arsitek dari negara lainnya.

Hal ini dikarenakan ketiadaan lisensi atau sertifikasi internasional untuk para arsitek lokal. Sehingga diharapkan dengan adanya RUU Arsitek mampu memberikan perlindungan terhadap arsitek lokal baik yang berkarya di dalam maupun di luar negeri.

"RUU Arsitek tak hanya memberikan proteksi terhadap arsitek lokal dari serbuan arsitek asing di dalam negeri tetapi juga memberikan legitimasi terhadap arsitek kita yang diluar negeri supaya mereka dihargai secara profesional," terang Totok.

Di sisi lain, dalam pandangan mini fraksinya anggota Baleg DPR Nihayatul Wafiroh dari Fraksi-PKB menekankan agar RUU Arsitek tidak mengekang arsitek lokal terkait pengaturan surat tanda registrasi

dan uji kompetensi seperti yang diatur di beberapa pasal dalam draft RUU Arsitek.

Nihayatul mengungkapkan, "Persyaratan itu jangan sampai mempersusah tetapi bagaimana persyaratan itu mendorong kemampuan - kemampuan arsitek Indonesia untuk lebih bisa berkembang dan berkiprah lebih maju, kalau bisa mewarnai dunia luar."

Berkaitan dengan pembentukan lembaga baru yakni Dewan Arsitek Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan Sertifikat Arsitek, anggota Baleg DPR Junaidi Auly dari Fraksi-PKS berpandangan diperlukan mekanisme pemilihan anggota dewan arsitek yang diangkat oleh Presiden secara terbuka dan transparan sehingga menghasilkan arsitek - arsitek yang profesional.

Selanjutnya RUU Arsitek dikembalikan kepada pengusung yakni Komisi V untuk dibawa ke Paripurna terdekat agar dibahas di tingkat selanjutnya. (ann,mp) foto: jaka/jayadi/parle/hr



Penandatanganan kesepakatan seluruh Fraksi mengenai RUU Arsitek



PENAHANAN IVAN HAZ JADI BAHAN TAMBAHAN TIM PANEL MKD



Wakil Ketua MKD Junimart Girsang

WAKIL Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang mengatakan penahanan anggota DPR RI, Fanny Safriansyah atau Ivan Haz menjadi bahan tambahan bagi panel di MKD.

"Saat ini proses etik Ivan Haz di MKD sudah masuk tahap panel. Dengan begitu perkara ini bisa dipastikan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dan penangkapan Ivan oleh Polda Metro Jaya itu akan menjadi bahan tambahan bagi panel," ungkap Junimart.

Tim Panel itu, lanjut Junimart diketuai oleh pihak dari luar MKD, yakni anggota DPR RI Lili Asjudireja. Dan Tim tersebut telah bekerja sejak seminggu yang lalu. Karena termasuk pelanggaran berat, dikatakan Junimart, akan ada dua ancaman yang akan dikenakan pada Ivan.

Ancaman pertama menurut Junimart adalah dengan hukuman skorsing atau pemberhentian sementara dari keanggotaan DPR selama tiga bulan. Ancaman kedua yang merupakan ancaman terberat adalah diberhentikan secara tetap dari anggota DPR.

"Dasar panel karena adanya dugaan pelanggaran berat. Bagaimana hasilnya, kita tunggu panel bekerja dengan professional. Hasil dari panel tersebut akan dilaporkan ke MKD," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya Senin (29/2) kemarin resmi menahan Ivan terkait kasus penganiayaan pembantu rumah tangganya. (Ayu), foto : iwan armanias/parole/hr.

PEMERINTAH DIMINTA TURUNKAN HARGA BBM LAGI

ANGGOTA Komisi VII DPR Kurtubi mengharapkan pemerintah untuk menurunkan harga BBM lantaran terus menurunnya harga minyak dunia. "Terus terang saya kecewa harga BBM hanya turun Rp 200. Paling tidak BBM harus turun Rp 1.000/liter, dengan turun yang lebih signifikan akan berdampak pada peningkatan daya beli. Pada gilirannya konsumsi naik dan produksi barang dan jasa juga naik, sehingga pabrik bekerja dengan kapasitas penuh," katanya kepada pers Selasa (1/3) di ruang kerjanya Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Contoh, keluarga pemilik sepeda motor dengan penghematan BBM tadinya hanya mampu beli telur 1 kg/bulannya, akan meningkat 2 kg. Dengan pemilik motor di Indonesia sekitar 80 juta orang, maka ada tambahan 80 juta kg telur. "Bayangkan dengan peningkatan itu, konsumsi susu dan kebutuhan pokok lainnya meningkat, lalu ada peningkatan produksi dan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi meningkat serta pajak yang juga akan melonjak," katanya.

Jadi lanjutnya, dengan harga minyak dunia yang murah ini kesempatan untuk menurunkan harga BBM secara signifikan. "Usul saya menurunkan harga BBM Rp 1.000, maka pemerintah sudah tidak mensubsidi lagi," tegasnya.

Harga BBM murah ini, kata Kurtubi, akan berlangsung lama bukan sebulan dua bulan, paling tidak dua tahun. Karena itu mestinya harga BBM diturunkan lagi sebesar Rp 1.000 sebab akan membawa dampak positif yang sangat besar tanpa

mengeluarkan subsidi. "Soal nanti kemungkinan naik lagi, misalnya *crude oil* sampai 100 USD, kasih tahu rakyat naikan lagi. Apalagi setiap 3 bulan pemerintah akan mengevaluasi harga BBM, mengapa takut-takut," tanya dia.

Ditanya mengenai tarif angkutan udara apakah bisa diturunkan, Kurtubi mengatakan tergantung harga avtur. "Otomatis kalau avtur turun signifikan, ya tarif angkutan udara termasuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bisa turun," terangnya.

Mestinya, kata politisi Partai Nasdem ini, penurunan harga BBM yang lalu sebesar Rp 1.000 bukan hanya Rp 200. Akibatnya organda tidak mau menurunkan tarif angkutan orang dan barang, susah sekali. "Harga BBM yang hanya turun Rp 200 gak ngaruh, dan tarif angkutan tidak bisa turun," tegasnya. Untuk itu dia kembali meminta harga BBM turun sebesar Rp 1000 dan akan minta Organda untuk kalkulasi ulang tarif angkutan. "Kalau harga BBM turun Rp 1000 maka tarif angkutan harus turun, kalau tidak, rakyat akan marah," ungkap Kurtubi mengingatkan. (mp) foto: azka/parole/hr.



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

ENDANG SRIKARTI KUNJUNGI PASIEN KOMA

SEBAGAI wakil rakyat yang peduli dan perhatian terhadap konstituennya, anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handiyani, Senin (29/2) meluangkan waktu untuk mengunjungi Rumantio (29) salah satu pemilihnya yang kini tengah dalam kondisi koma di rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur.

Kedatangan Endang, selain melihat kondisi Rumantio, sekaligus untuk memberi semangat keluarga serta meminta kejelasan dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, terkait kondisi yang menyebabkan Rumantio koma.

"Karena ini merupakan kewajiban saya dalam memperjuangkan nasib salah satu



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti mengunjungi pasien koma

warga saya di dapil. Saya mengharapkan, Rumah Sakit yang tengah menangani Rumantio, memberikan perhatian khusus kepada Rumantio demi kesembuhannya," jelas Endang dihadapan keluarga, dokter dan manajemen RS.

Berdasarkan informasi dari keluarga,

Rumantio, yang juga merupakan konstituen Endang yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, koma sejak tanggal 20 Februari 2016 setelah mengalami kejang-kejang, dimana sebelumnya diawali pada 11 Februari, Rumantio hanya mengeluh sakit kepala.

Menurut dokter yang menangani, sakit Rumantio disebabkan oleh adanya pendarahan di dalam otak. Dokter pun telah melakukan serangkaian tindakan salah satunya melalui *CT Scan* dan *MRI*. (rnm/nt) Foto: Jay

PERLU EVALUASI IMPLEMENTASI DOB

ANGGOTA Komisi II DPR RI Sukiman meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB) apakah betul-betul menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak. Hal itu disampaikan saat Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan RPP mengenai Penataan Daerah di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (29/02).

"Saya meminta kepada Pak Menteri untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah terlaksana sejak tahun 1999. Karena kita juga ingin melihat apakah kebijakan pemekaran daerah ini betul-betul

mendorong percepatan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan. Apakah itu betul tercapai? Saya kira ini perlu disampaikan. Saya pikir ini perlu pak menteri selesaikan dan diserahkan pada kita sebagai mitra kerja," ujar anggota DPR Fraksi PAN ini.

Selain itu Sukiman juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada

pemerintah terkait RPP Desertada ini sebagai bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen itu sebagai bagian dari amanat UU No 23 Tahun 2014. "Saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah telah menyampaikan RPP desertada. Saya lihat sudah ada langkah maju bahwa pemerintah punya komitmen untuk penyelesaian itu sebagai



Anggota Komisi II DPR Sukiman (kiri)

bagian dari amanat pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, paparnya.

"Beranjak dari situ, ini menjadi payung hukum untuk menentukan daerah persiapan yang begitu banyak dan antusias bagi daerah yang ingin dilakukan pemekaran," sambungnya.

Politisi PAN ini juga memberikan catatan agar ada pengawasan terhadap

serapan anggaran di kawasan perbatasan karena sering ditemukan adanya sektor-sektor yang tidak dilakukan serapan anggaran walaupun sudah dialokasikan. "Terkait persoalan membangun perbatasan, saya menyambut baik ini Pak. Tetapi perlu ada pengawasan terhadap serapan anggaran di perbatasan, karena sering ditemukan ketika sudah dianggarkan tapi tidak semua bisa dilaksanakan. Kepada Pak Menteri semoga bisa mengevaluasi ini. Karena ini menyangkut penyerapan anggaran," ujar Sukiman dari Dapil Kalimantan Barat ini.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman yang juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah terkait RPP Desertada dan RPP Penataan daerah ini.

"Komisi II dapat memahami dan memberikan apresiasi terhadap

pemerintah atas penyampaian RPP Desertada dan RPP Penataan Daerah. Namun demikian Komisi II DPR RI juga meminta untuk dilakukan penyempurnaan dengan memasukan saran dari Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI yang berkaitan dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota hingga tahun 2025," pungkas Rambe. (hs, mp) foto: runi/parle/hr.



KOMISI VI AKAN USUT KONTRAK Kawasan Hotel Indonesia di Panja Aset



Ketua Komisi VI Hafisz Tohir (kanan) foto

Komisi VI DPR RI akan mengusut adanya permasalahan dugaan permainan dalam perpanjangan kontrak Kawasan Hotel Indonesia di Panitia Kerja (Panja) Aset.

"Permasalahan ini sudah masuk pada ranah hukum, Kejaksaan Agung juga sudah mulai melakukan pendalaman pada permasalahan perpanjangan kontrak yang mengakibatkan kerugian pada aset negara ini," kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir saat memimpin RDP dengan Deputi bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN dan PT. Hotel Indonesia Natour (HIN), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/2).

Seluruh BUMN, jelas Hafisz, memiliki kewenangan untuk memasukkan masalah ini dalam Panja Aset BUMN di Komisi VI, dan dalam Panja Aset BUMN Komisi VI punya hak untuk tidak melegalkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melepas aset-aset yang dimiliki negara.

"Kita punya kesempatan di Panja Aset BUMN untuk melakukan 'de-legal' (tidak melegalkan) terhadap aset-aset BUMN yang banyak lepas dari pemerintah," tegas politisi F-PAN dari dapil Sumatra Selatan I.

Senada dengan Pimpinan Sidang, Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal bahkan lebih konkret, dia meminta langsung kepada Ketua Panja Aset, Azam Azman Natawijana untuk memasukkan permasalahan ini menjadi agenda kerja Panja Aset untuk diusut sampai tuntas.

"Pak Azam sebagai Ketua Panja Aset ini harus dimasukkan," pinta Refrizal kepada Ketua Panja Aset Komisi VI. Azam yang juga Wakil Ketua Komisi VI, pada RDP ini berada di meja pimpinan memberikan isyarat persetujuannya dengan menganggukkan kepala.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dari F-PKB bahkan memberikan opsi bahwa

permasalahan ini bahkan bisa dibuatkan panitia khusus (Pansus) layaknya kasus pelindo. "Kalau tidak bisa diselesaikan di Panja Aset, kenapa tidak dibuat Pansus," ujar Eem.

Eem melanjutkan, PT HIN tidak mampu menjaga aset yang diamanahkan oleh negara. Bahkan dia berprasangka, ada unsur kesengajaan. "Jangan-jangan kasus semacam ini dibiarkan supaya ada pihak-pihak tertentu mendapat keuntungan," ungkapnya.

Berdasarkan bahan rapat dari Kementerian BUMN, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan, perpanjangan kontrak Kawasan Hotel Indonesia berpotensi merugikan negara Rp 1,29 triliun. Persoalan kontrak Kawasan Hotel Indonesia muncul karena PT HIN memperpanjang kontrak kawasan itu dari 30 tahun menjadi 50 tahun. Sementara perpanjangan kontrak Kawasan Hotel Indonesia terjadi pada 2010, oleh jajaran direksi sebelumnya.

Awalnya, PT HIN menggandeng PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI) untuk mengembangkan kawasan Hotel Indonesia selama 30 tahun dengan perhitungan nilai kompensasi Rp 355 miliar atau 25 persen dari NJOP.

Perjanjian perpanjangan dilakukan pada 2010 dengan kompensasi sebesar Rp 400 miliar. Nilai kontrak ini dinilai oleh BPK tidak layak. Hal lainnya yang juga memunculkan pertanyaan adalah saat opsi perpanjangan ini diteken, diketahui kontrak tak lagi dipegang oleh CKBI, tetapi dengan PT Grand Indonesia. Padahal, dalam perjanjian awal, CKBI tidak boleh mengalihkan atau melepas tanggung jawab pelaksanaan kerja sama kepada pihak lain, yang dalam hal ini adalah PT Grand Indonesia. (eko/nt) foto: jaka/parle/hr.

PENGAJAR PONDOK PESANTREN BERHARAP DISAMAKAN DENGAN GURU MADRASAH

STATUS pengajar pondok pesantren diharapkan bisa sama dengan guru madrasah, demikian salah satu topik yang mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Tata

Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam (Pendis) Komisi VIII DPR RI mengunjungi Pondok Pesantren Putri Al Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan, Jum'at (26/2/2016).

Tim Kunspek Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendis Komisi VIII DPR yang dipimpin Abdul Malik Haramain didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel Muhammad Tambrin,



Tim Kunspek Panja Tata Kelola dan Anggaran Komisi VIII

menyempatkan diri mendengar dan menghimpun masukan dari para pengajar pondok pesantren (Ponpes) Al Falah Banjarbaru Kalsel guna mendapatkan informasi utuh mengenai Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam.

"Kami mengapresiasi setiap masukan dari para pengajar dan pengelola pondok pesantren guna memperoleh gambaran yang tepat demi terciptanya tata kelola anggaran pendidikan islam yang lebih baik dan merata," ungkap Haramain.

Menanggapi harapan para pengajar pondok agar statusnya sama dengan guru madrasah, Politisi muda asal PKB

terbuka.

"Solusi jangka pendeknya mereka harus mengajar di madrasah dengan kurikulum sesuai yang diterapkan pemerintah serta mengikuti proses sertifikasi guru madrasah, jika hanya mengajar di pondok saja memang sulit tapi ini menjadi bahan masukan untuk kita cari jalan keluarnya bersama Kemendikbud," jelas Haramain.

Politisi Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini juga mengakui memilih mengunjungi Provinsi Kalimantan Selatan karena di wilayah ini terdapat ratusan pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai ribuan, sehingga perlu diketahui

ini mengakui masih m e m b u t u h k a n proses yang cukup panjang karena m e n y a n g k u t kurikulum Ponpes dan sertifikasi guru. Bagi pengajar pondok pesantren yang juga mengajar di madrasah serta i k u t p r o s e s sertifikasi guru maka peluangnya menjadi PNS lebih

bagaimana tata kelola anggaran pendidikannya selama ini, serta sejauh mana bantuan pemerintah pusat menjangkau pesantren-pesantren di luar Jawa.

"Secara demografi Provinsi Kalsel mayoritas muslim dengan jumlah pondok pesantren cukup banyak mirip Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga kami merasa perlu mengetahui bantuan apa saja yang sudah diterima dan apa pula yang perlu ditingkatkan agar tidak kalah dengan pondok pesantren di Jawa," ujar Haramain.

Sebagaimana diketahui, jumlah santri putra Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru mencapai 1500, sementara santri putri 1600 dengan jumlah pengajar hanya 140 ustadz/ah dengan status swasta (bukan PNS). Beberapa orang guru madrasah sudah tersertifikasi, sementara guru pondok belum ada yang tersertifikasi.

Ikut dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Abdul Malik Haramain (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VIII), Ledia Hanifa Amaliah (Wakil Ketua Komisi VIII), Endang Maria Astuti, Zulfadli, Ruskati Ali Baal, Kuswiyanto, dan Abdul Fikri Faqih. (oji) foto: naefuridji/parle/hr.

Panja Perfilman Komisi X SERAP MASUKAN KE ISI BALI

Indonesia (ISI) Bali.

Dari permasalahan yang beragam itu, tidak ada landasan hukum yang pasti bagi para pelaku industri perfilman. Untuk itu, Panja Revisi UU Perfilman Komisi X DPR menilai bahwa industri perfilman perlu direvisi. Selama ini industri film nasional ataupun lokal kurang berkembang. Dalam implementasi Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, banyak yang sangat multitafsir.

"Bahkan hingga saat ini, belum ada PP atau Permen dari UU ini. Sehingga, industri ini berjalan, tapi masih tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan," kata Ketua Panja Perfilman Abdul Kharis Almasyhari di ISI Bali, Sabtu (27/2/2016).

Lebih Lanjut Kharis mengatakan, film memiliki peran penting sebagai alat pendidikan, penerangan, dan alat



Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari (kiri)

IMPLEMENTASI Undang-Undang 33/2009 mengalami banyak kendala. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah

produksi film nasional yang berkualitas, minimnya akses masyarakat terhadap film sekitar 12% dan ekspansi film impor yang mulai menguasai pasar perfilman Indonesia.

Selain itu, rencana dicabutnya Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap industri film dalam hal ini asing bisa memiliki saham seratus persen, mendorong Tim Panja Revisi UU Perfilman Komisi X DPR menjangring masukan dari Institut Seni



budaya, sehingga seiring dengan program pemerintah. Untuk itu, Pemerintah harus hadir dan mendukung industri perfilman Indonesia.

"Dari segi pendidikan film di Indonesia masih minim. Perguruan tinggi yang khusus mengenai perfilman itu baru Institut Seni Indonesia (ISI), dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), itupun masih perguruan tinggi swasta. Belum ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khusus film. Dalam pertemuan dengan ISI Bali, mereka menginginkan adanya SMK Perfilman, sehingga akan banyak pelaku perfilman yang lebih siap pakai dalam industri film" kata Kharis.

Lebih lanjut Abdul Kharis Almasryhari menjelaskan, cukup banyak orang yang bergantung pada industri ini. Sehingga, setiap orang di dalamnya, mendapatkan apa yang menjadi haknya, misalnya royalti. Jika industri film itu dijadikan profesi, orang bisa hidup dari situ. Bukan hanya pemainnya, tapi seluruh pelaku industri perfilman bisa merasakannya. Panja Perfilman Komisi X DPR RI berharap dengan dibentuknya Panja perfilman ini, semua pemangku kepentingan dalam industri film dapat merasakan keuntungan. ungkapanya. (andri), foto : andri/parle/hr.

POSTUR PERTAHANAN INDONESIA MASIH SANGAT MINIM

Komisi I mendukung penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016, oleh Kementerian Pertahanan. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menilai postur pertahanan Indonesia masih sangat minim, sehingga kemampuan kontrol negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kurang maksimal.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masih banyak titik kosong (*blankspot*) yang menjadi celah bagi berbagai macam hal yang bisa merugikan kepentingan negara, misalnya penyelundupan senjata, *illegal human trafficking*, dan lain sebagainya.

"TNI dan Kementerian Pertahanan sudah mempunyai perencanaan mengenai apa yang akan dibeli, akan diadakan, dan yang akan dikerjasamakan berkaitan dengan alutsista ini, sehingga penggunaan anggaran itu bisa lebih efektif," kata Mahfudz, usai Rapat Kerja tertutup Komisi I dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kamis (25/2/2016).

Selain itu, Komisi I juga mendorong agar Pemerintah menetapkan kebijakan

sumber pembiayaan luar negeri yang lebih meningkat untuk Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI.

"Penggangan untuk pertahanan tidak cukup hanya dengan APBN, karena jumlah rupiah masih terbatas, dan APBN ini diikat oleh waktu dimana seluruh proses pengadaan harus selesai pada akhir tahun. Sementara kalau kita lihat produk-produk alutsista proses produksinya melebihi waktu 1 tahun. Maka di

sinilah ada kebutuhan pinjaman luar negeri dimana secara waktu lebih fleksibel," paparnya. (as) foto:ray/parle/ry



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik

Komisi IV Jadi Penyalur Aspirasi PELAKU PERIKANAN



Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi

KOMISI IV DPR menerima keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh 34 elemen masyarakat yang bergerak bidang

perikanan di Indonesia, pada acara rapat dengar pendapat umum di gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).

Berbagai persoalan yang dialami oleh para pelaku bidang perikanan tersebut, meminta kepada dewan di Komisi IV, agar permasalahan yang mereka hadapi dicarikan jalan keluarnya. Mereka mengadukan tentang peraturan pemerintah yang dirasakan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup para nelayan dan anak buah kapal, yang merasa dirugikan oleh sikap ketidakpastian pemerintah dalam mengimplementasikan pelaksanaan aturan hukum tentang penangkapan ikan.

Viva Yoga Mauladi, selaku pimpinan rapat, menyatakan bahwa Komisi IV akan berupaya menjadi penyalur aspirasi yang seimbang, bagi para pegiat dunia perikanan Indonesia.

Saat menanggapi beragam keluhan yang dilontarkan dalam RDPU itu, Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga, menyatakan rasa senasib dan sepenanggungan kepada masyarakat nelayan dan ABK yang hadir di ruang sidang.

Dalam kesempatan tersebut, seorang perwakilan asosiasi di bidang perikanan, memberikan satu berkas dokumen yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Komisi IV, untuk dipelajari dan diverifikasikan kepada pihak pemerintah.

Kita akan memverifikasikan masalah ini kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujar politisi F-PAN Dapil Jawa Timur X itu. (dep) foto: arief/parle/hr.



Anggota Komisi V DPR

Beda Pendapat Mengenai Kereta Cepat

PERBEDAAN pendapat Anggota Komisi V DPR mengenai proyek kereta cepat Jakarta Bandung terlihat dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2)

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Fauzih Amro mengatakan, karena proyek kereta cepat ini adalah instruksi dari Presiden maka seluruh jajarannya wajib melaksanakan.

"Apa yang menjadi keinginan Presiden yah wajib dilaksanakan, walaupun saya tahu betul, setiap kali Pak Jonan bicara di Media, itu kan kayanya enggak menerima, tapi kan ini harus dilaksanakan, *sami'na wa atho'na* dengan pimpinan itu jelas hukumnya," jelas Fauzih.

Ia menambahkan, bahwa kereta cepat ini harus dilaksanakan, karena ini merupakan proyek percontohan pertama. "Siapa tahu setelah ini berhasil, walaupun entah kapan terlaksananya," ujarnya.

Selanjutnya, Suhartono anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem, menerangkan, bahwa kereta cepat harus terwujud. "Bagi kami (Fraksi Nasdem_red) harus terwujud, ini merupakan kebanggaan bangsa kita biar kita tidak kuno," jelasnya.

Nizar Zahro anggota Komisi V DPR dari Gerindra pun memberikan pernyataannya, bahwa pada prinsipnya Fraksi Gerindra sejak awal konsisten jika ingin membangun infrastruktur namun yang terpenting konsisten dalam regulasinya.

"Kita setuju asalkan semua regulasi itu dipenuhi kalau semua regulasi itu kita tabrak bagaiman kita menjalani proses bertata negara yang baik," tegas Nizar yang juga politisi dari Dapil Jatim XI ini.

Namun Nizar menerangkan, bahwa dari sepuluh negara yang melaksanakan kereta cepat itu yang untung hanya dua

yang rugi adalah delapan, "Apa kita biarkan negara ini melakukan proyek yang sudah pasti rugi, dan pada prinsip kami silahkan diteruskan sesuai dengan regulasi," ujarnya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Umar Arsal dari Fraksi Demokrat, menurutnya berbicara kereta cepat bukan soal penting atau tepat. "Saya pribadi merasa untuk kondisi sekarang belum tepat dan mendesak, dan kami hampir dari semua teman-teman Fraksi Demokrat belum semuanya setuju untuk saat ini," tegasnya.

Menurut pandangan dari Roem Kono anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, fraksi nya setuju jika untuk percepatan pembangunan moda transportasi sekarang, namun juga harus melihat dari tatanan kenegaraan.

"Saya memang setuju sekali, kalau itu memang pembangunannya *business to business*, jadi tidak ada campur tangan pemerintah dalam rangka pembiayaannya, namun demikian kita melihat perkembangannya bahwa ada usulan agar investor meminta jaminan

dari pemerintah, nah itu yang kita tidak setuju," jelas Roem yang berasal dari dapil Gorontalo.

"Sepanjang ini dibangun oleh swasta, saya tidak masalah, tetapi jangan investor datang kesini terus memanfaatkan APBN kita, oleh karena itu, kepada pemerintah ini perlu kajian kembali," paparnya.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mengatakan bahwa setiap pembangunan itu pasti saling ada keterkaitannya.

"Keterkaitan, artinya kita punya Renstra Perkeretaapian di Indonesia dan setiap ada sesuatu yang baru masuk pasti dia akan mempengaruhi Renstra itu secara keseluruhan. Dan saya belum mendapat penjelasan dari Pak Menteri bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini justru akan memberi dampak yang signifikan atau merubah sama sekali Renstra Perkeretaapian kita," kata Sigit.

Sementara dalam problem-problem Perkeretaapian, tambah Sigit, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi seperti perlintasan yang masih banyak. "Satu bidang saja belum selesai kemudian ini ada masuk kereta cepat, jadi saya kira ini penting ingin mendapatkan informasi dari Pak Menteri dan saya berharap kereta cepat ini justru akan memberi dampak signifikan yang positif bagi perkeretaapian nasional," terangnya. (nt) foto: runi/parle/hr.



Suasana Raker Komisi V DPR dengan Menhub



Komisi VIII Soroti PENDATAAN FAKIR MISKIN



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partonan Daulay

kita lihat implementasi program-program penanggulangan kemiskinan, baik yang dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya. kemudian Komisi VIII akan tetap mengawasi ini, dan janji mereka sebetulnya akan dilakukan," jelasnya.

Kemudian, Komisi VIII menuntut ada simulasi-simulasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang harus dipaparkan lebih jauh lagi, terkait pengaruh dan dampak positif

penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Komisi VIII menginginkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk pengurangan kemiskinan harus mempunyai pengaruh positif dari penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, Komisi VIII minta kepada Kementerian Sosial untuk membuktikannya kepada DPR bahwa program penanggulangan kemiskinan memang betul-betul ada pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

"Kalau sekarang masih ada intervensi dengan memberikan bantuan sosial yang luar biasa banyak kepada fakir miskin, tetapi pembuktian terhadap itu secara akurat belum ada. Ada klaim penurunan sekian persen, namun perlu ada pengukuran-pengukuran penurunan angka kemiskinan yang akurat," tegasnya.

(as) foto: kresno/parle/hr.

Dalam Rapat Komisi VIII bersama Kementerian Sosial banyak mendiskusikan mengenai pendataan fakir miskin. Kementerian Sosial mengklaim bahwa data kemiskinan di Indonesia sudah satu pintu, yang sebelumnya data itu ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, dan Kementerian yang lain.

"Saat ini data Pemerintah tentang kemiskinan sudah satu pintu di tangan Kementerian Sosial. Memang amandat UU seperti itu, karena itu Komisi VIII apresiasi. Tapi tentu saja perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan dari saran-saran Komisi VIII untuk membuktikan bahwa data itu betul-betul satu," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, usai RDP dengan Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, di Gedung DPR, Kamis (25/2/2016).

Menurut Saleh, DPR akan melakukan pengawasan kepada Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program-program penanggulangan kemiskinan. "Nanti akan

PANJA PPILN KOMISI IX HIMPUN MASUKAN DARI KEMENKUMHAM DAN KEMENLU

PANJA RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) Komisi IX DPR menerima masukan terkait perubahan UU Nomor 39 Tentang PPILN dari perwakilan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Kamis (25/2).

Wakil Ketua Komisi Syamsul Bachri sampaikan bahwa masukan tersebut nantinya akan dijadikan bahan rekomendasi Komisi IX kepada pemerintah terkait perlindungan TKI di luar negeri.

"Masukan ini, nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Komisi IX DPR kepada Pemerintah untuk mencari jalan keluar demi melindungi TKI di luar negeri," kata Symsul.

Lebih lanjut, Syamsul Bachri mengatakan bahwa RUU ini dinilai relatif rendah dari unsur perlindungan dan pelayanan, oleh karena itu komis IX akan memperbaiki atau merubah UU bahkan merubah

paradigmanya dari penepatan diarahkan kepada pelayanan dan perlindungan. Sehingga akan menonjolkan peranan negara baik dalam pra penempatan, pada saat penempatan dan juga purna penempatan.

"Paradigma penempatan yang



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri



relatif menempatkan tenaga kerja luar negeri itu sebagai objek diubah menjadi subjek yang akan mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara," ungkapnya.

Syamsul juga tegaskan bahwa, Komisi IX mengharapkan masukan dari Kementerian Hukum dan HAM khususnya yang terkait dengan aspek-aspek keimigrasian, aspek perundang-undangan dan dari Kementerian Luar Negeri mengenai bagaimana proses perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap pekerja migran yang ada di luar negeri.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah baik di dalam negeri mulai dari persiapan, pemberian passpor sampai dengan yang dilakukan di luar negeri.

"Kalau kita dengar nampaknya sudah cukup lengkap langkah-langkah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, oleh negara kepada warga negara kita di luar negeri termasuk didalamnya adalah TKI," ujarnya.

Selanjutnya, peran Dirjen Imigrasi dalam upaya melindungi TKI seperti memiliki dokumen yang meliputi (KTP, Sertifikat kompetensi kerja, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja hingga perjanjian penempatan TKI). Dalam penempatan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. *(rnm) foto: jayadi/parle/hr.*

Legislator Harapkan Semua Kelembagaan Film Kompak



Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Bali Ida Bagus Putu Sukarta

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Bali Ida Bagus Putu Sukarta menilai, adanya Panja Perfilman DPR ini, diharapkan dapat membuat seluruh asosiasi perfilman di bawah Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) juga pelaku industri film semakin kompak. Pasalnya, selama ini belum ada kesepakatan yang sama antar asosiasi dan pelaku industri film.

"Perlu koordinasi dan sinergi antar lembaga yang berkepentingan, yakni Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF). Mereka terlihat berjalan sendiri-sendiri," katanya saat mengikuti

pertemuan Tim Panja Perfilman Komisi X dengan ISI Bali, Sabtu (27/2). Untuk LSF, kata Putu Sukarta, memang harus melibatkan Komisi I DPR RI sehingga kebijakan yang diambil untuk memajukan industri film tidak tumpang tindih.

Ada beberapa poin permasalahan yang mencuat dalam diskusi yang dilakukan Tim Panja Perfilman Komisi X DPR dengan ISI Bali di

antaranya permasalahan gedung bioskop yang mahal dan tidak adanya panggung pertunjukkan film untuk masyarakat.

Karena itu, dengan dibentuknya Panja Perfilman ini, diharapkan menjadi momentum baik untuk menumbuhkan film Indonesia lebih baik dan masyarakat Indonesia diharapkan makin mengapresiasi film-film Indonesia yang berkualitas.

"Komisi X DPR RI akan membahas dan merampungkan RUU ini dalam dua masa persidangan. Masukan ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk pembahasan, dan menjangkau masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan," pungkas Kharis. *(andri) foto: andri/parle/hr.*

KOMISI X TINJAU CAGAR BUDAYA MASJID MENARA KUDUS



Tim Kunspek Komisi X

KOMISI X DPR mengunjungi langsung Cagar Budaya Masjid Menara Kudus yang menjadi kebanggaan umat Islam Nusantara. Kunjungan ke lokasi wisata religi seperti ini terasa nyaman. Ibadah pun menjadi lebih baik.

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya (F-PD) ke Kudus, Jawa Tengah baru-baru ini, didampingi Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), dan Anggota Komisi X Dadang Rusdiana (F-Hanura) mengunjungi destinasi wisata religi ini, usai menggelar pertemuan dengan para rektor PTN dan BEM se-Jawa

Tengah.

Dalam pertemuan tersebut hadir Rektor UNDIP Yos Johan Utama, Rektor UNNES Fathur Rokhman, Direktur Polimarin Sri Tutie Rahayu, PTS di wilayah Semarang. Rombongan juga menyempatkan ziarah ke makam Kanjeng Sunan Kudus.

"Alhamdulillah, saya, Abdul Kharis Almasyhari, dan Dadang Rusdiana dapat berkesempatan salat Ashar berjamaah di Masjid Menara Kudus. Masjid ini menggunakan arsitektur bernuansa Hindu pada beberapa bagiannya. Karena saat



masjid ini dibangun, di wilayah tersebut masih banyak pemeluk agama Hindu," ungkap Riefky panggilan akrabnya kepada Media Cetak dan Media Sosial DPR RI.

Riefky menuturkan bahwa kompleks Masjid Menara Kudus ini adalah salah satu cagar budaya yang menjadi kebanggaan umat muslim, khususnya di Jawa bahkan tidak hanya di Jawa tapi juga dunia. Di sisi lain, lanjutnya, ini terkait juga dengan wisata religi yang sekarang juga sudah menjadi program prioritas di Kementerian Pariwisata dimana wisatawan-wisatawan yang berwisata mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman sehingga ibadahnya bisa lebih baik.

"Tadi kita sudah melihat bagian belakang masjid terdapat makam Kanjeng Sunan Kudus, salah seorang Wali Songgo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Pada area yang sama juga terdapat makam murid-murid beliau, makam para pangeran, dan para kerabat beliau lainnya," jelasnya.

Lebih jauh Riefky menjelaskan bahwa ada aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Menara Kudus dan Makam Kanjeng Sunan Kudus menyampaikan bahwa perlu adanya perhatian untuk menjaga dan melestarikan dalam merawat kompleks cagar budaya ini. "Jelas nanti akan kita sampaikan dan kita teruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," pungkasnya.

Sementara Ketua Yayasan Masjid Menara Kudus dan Makam Kanjeng Sunan Kudus, Nazib Hasan menyampaikan bahwa tata ruang sekitar masjid nampak amburadul. Karena terletak di pusat kota Kudus, hanya lima menit dari alun-alun kota Kudus. Masjid ini dikepung oleh perumahan penduduk yang cukup padat, sehingga mengurangi keindahan kompleks bangunan Masjid Menara Kudus ini yang sekarang masuk sebagai salah satu cagar budaya.

Selain itu, lanjutnya, banyak pengemis yang berada disekitar masjid yang juga dapat mengganggu para pengunjung yang datang. "Agar terus terjaga kelestariannya, penataan ruang sekitar masjid harus diperbaiki kembali untuk mempertahankan kesan indah dan unik Masjid Menara Kudus ini," harapnya. (iw) foto: iwan armanias/parle/iw.

PANJA MEA BKSAP TERIMA MASUKAN DARI PELAKU USAHA SUMUT



Wakil Ketua BKSAP DPR Rofi Munawar

Panitia kerja (Panja) Masyarakat ekonomi ASEAN bentukan BKSAP (badan kerjasama antar parlemen) DPR RI, Rabu (24/2) menerima aspirasi atau masukan dari Pemerintah provinsi Sumatera Utara dan jajarannya, juga para pelaku usaha.

"Kami, pengusaha seperti ayam yang diinjak-injak ayam luar yang berkuku tajam. Artinya masuknya pengusaha luar ke Indonesia sebagai salah satu konsekuensi MEA ini sangat mengancam keberadaan pengusaha," ungkap Asril, salah satu pengusaha asal Sumatera Utara.

Ditambahkannya, saat ini ia menilai tidak adanya peraturan yang jelas tentang barang masuk dan keluar alias ekspor dan impor. Misalnya, ketika pengusaha Indonesia akan mengekspor barang ke luar negeri, banyak regulasi yang harus dilalui. Namun ketika barang luar negeri masuk ke Indonesia, ia menilai tidak ada pengawasan yang ketat. Hal itu terlihat dari masuknya beberapa barang palsu

atau KW ke Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi' Munawar mengatakan bahwa sebelum memasuki MEA tepatnya bulan April 2015 lalu, sejatinya DPRD Sumatera Utara telah membuat Pansus MEA. Ada sebelas kesepakatan dalam Pansus tersebut. Jika sebelas kesepakatan itu dilaksanakan, menurut politisi dari Fraksi PKS ini kemungkinan besar akan dapat

menjawab segala apa yang dikeluhkan para pelaku usaha di provinsi tersebut.

"Bulan April 2015, DPRD Sumut telah membuat Pansus MEA, ada sebelas kesepakatan di dalamnya. Salah satunya regulasi tentang barang keluar dan masuk. Kalau semua itu dilaksanakan mungkin bisa menjawab apa yang dikeluhkan pelaku usaha tadi," ujar Rofi.

Meski demikian, menurut anggota BKSAP, Nazarudin Kiemas yang memimpin Tim kunjungan Panja MEA BKSAP ke Sumatera Utara, masukan-masukan dari para pelaku usaha dan pemprov Sumut itu sangat bermanfaat. Pihaknya akan menindaklanjutinya dalam sebuah regulasi yang intinya untuk memberikan kemudahan-kemudahan pelaku usaha negeri sendiri untuk bersaing di dalam MEA. Hal tersebut pun diamini oleh Rofi, dan Tim Kunjungan Panja MEA Sumatera Utara lainnya seperti Sudin, dan Dwi Aroem. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

KOMISI IX MINTA BPJS PERCEPAT Analisa Data Biaya Pelayanan

KOMISI IX DPR RI meminta agar BPJS Kesehatan terutama Tim Penyusunan Tarif, untuk mempercepat analisa data biaya pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan di lapangan.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan, Rabu (02/3) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Syamsul Bachri, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Komisi IX DPR RI mendesak Dirjen BPJS Kesehatan bersama dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk membuat kajian terkait Penyesuaian Besaran Iuran, Suntikan Dana Tambahan



Komisi IX RDP dengan Pengawas BPJS

dari Pemerintah dan Penyesuaian manfaat sebagai solusi atas kemungkinan terjadinya *missmatch* luran dan Pengeluaran di tahun 2016.

Pelaksanaan kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama dan sistem pembayaran klaim dengan metode INA CBG's di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

Selain itu, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk mendorong implementasi *Coordination of Benefit* (COB) sebagai salah satu upaya untuk peningkatan jumlah Peserta Penerima Upah (PPU)

Selanjutnya Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mengatasi

permasalahan peserta kelas III mandiri yang memenuhi kriteria tidak mampu untuk dialihkan menjadi peserta PBI daerah yang merupakan bagian yang integral dalam program JKN selambat-lambatnya akhir tahun 2016.

Komis IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untuk melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI dalam upaya melakukan terobosan peningkatan kepatuhan peserta mandiri, termasuk memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pentingnya kolektifitas iuran peserta BPJS Kesehatan kepada masyarakat. (rnm,mp) foto: jayadi/parle/iw.

KETUA BKSAP SARANKAN PAKISTAN SELALU ANGKAT ISU KASHMIR DI FORUM INTERNASIONAL

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan agar Pakistan selalu membawa dan mengangkat isu Kashmir dalam setiap forum Internasional seperti di IPU maupun PBB.

"Publik perlu *aware* (sadar-red) terkait isu Kashmir ini, karena telah menjadi isu internasional dimana terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia," kata Nurhayati dalam pertemuannya dengan Dubes Pakistan untuk Indonesia Mohammad Aqil Nadeem, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2).

Untuk itu, lanjut Nurhayati, dirinya juga mengajak warga Kashmir untuk berani bersuara, dan melawan sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati juga menegaskan bahwa didalam konstitusi Indonesia melarang keras segala bentuk okupasi maupun kolonialisme dalam bentuk apapun dan dirinya menyayangkan kurangnya informasi terhadap konflik ini.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Pakistan Mohammad Aqil Nadeem Dubes menjelaskan, Pakistan telah membawa isu Kashmir ini di banyak forum, dan telah ada enam resolusi yang membahas namun dunia seakan tidak terlalu memperdulikannya.

Nadeem menjabarkan beberapa alasan seperti dilarangnya pemimpin Kashmir untuk keluar negeri, dilarangnya pers internasional untuk masuk, serta kuatnya propaganda dari India. Dirinya berjanji untuk terus memberi info terkini terkait isu tersebut.

Selain itu, tambah Nadeem, dirinya meminta agar Indonesia lebih mengambil perhatian terhadap konflik ini. "Saya sangat menyayangkan perbedaan perlakuan antara konflik Palestina-Israel dengan konflik Kashmir, padahal kedua wilayah sama-sama mayoritas berpenduduk Muslim," ujarnya.

Sekedar informasi, Konflik ini telah terjadi sejak 1947 antara pemerintah Pakistan dengan India. Wilayah Kashmir diklaim oleh India dan Pakistan yang secara *de facto* dipecah dua ketika garis gencatan

senjata dicapai tahun 1949. Konflik ini juga dipicu oleh konflik internal antara gerilyawan Kashmir, beberapa mendukung akses Kashmir ke Pakistan, dan beberapa mendukung kemerdekaan penuh Kashmir yang diperburuk dengan pendudukan India yang merupakan konflik utama dan sumber kekerasan di wilayah itu sejak tahun 2002.

Sebanyak 80.000 penduduk Kashmir tewas dalam 25 tahun terakhir oleh tentara India. Dalam kesempatan ini, dubes Nadeem meminta Indonesia untuk lebih mengambil perhatian terhadap konflik ini. Dubes menyayangkan perbedaan perlakuan antara konflik Palestina-Israel dengan konflik Kashmir, padahal kedua wilayah sama-sama mayoritas berpenduduk Muslim. (nt) foto: dok.bksap/parle/hr.



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf



Komisi X dan Kemenpora

SELESAIKAN PEMBEKUAN PSSI Paling Lambat April 2016

PERMASALAHAN pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), menjadi salah satu fokus pembahasan Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Rabu (2/03/2016). Komisi X DPR mendesak Menpora segera menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI yang telah berlangsung lebih dari setahun itu.

"Komisi X DPR-RI mendesak pencabutan SK Menpora RI NO 01307 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui. Serta mengkaji kembali persyaratan terhadap pencabutan SK tersebut," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto (F-PDI Perjuangan), selaku pimpinan rapat, saat membacakan salah satu poin kesimpulan.

Agar permasalahan segera selesai, masih kata Utut, Komisi X DPR

memberikan batas waktu kepada Menpora agar segera mencabut pembekuan PSSI paling telat April 2016 mendatang. Hal ini terkait adanya agenda Kongres FIFA di Meksiko Mei mendatang, yang dikhawatirkan berimbas pada sanksi FIFA kepada PSSI.

"Dalam upaya mencabut sanksi FIFA terhadap PSSI, maka Komisi X DPR-RI meminta Menpora untuk menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI selambatlambatnya bulan April 2016," tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, Menpora sudah memiliki itikad baik untuk mencabut SK pembekuan PSSI itu. Tentunya, sebagai mitra kerja dari Menpora, pihaknya senantiasa akan mendorong niat baik Menpora.

"Persoalan PSSI ini sudah satu setengah tahun. Kita melihat itikad baik Menpora untuk menyelesaikan

permasalahan PSSI, yang akan segera mencabut SK pembekuan PSSI, tentu niat baik ini kita dorong. Komisi X mendesak percepatan pencabutan itu, selambatnya bulan April pencabutan harus sudah selesai, agar tidak sempat terjadi sanksi FIFA," tegas Sutan.

Terkait persyaratan yang diminta Menpora agar pembekuan bisa dicabut, Politisi F-Gerindra itu meminta agar dikaji terlebih dahulu, agar lebih realistis. Pasalnya, menurut Sutan ada persyaratan yang sulit dilakukan oleh PSSI.

"Apa yang menjadi syarat Menpora itu kita lihat tidak mungkin dilakukan oleh PSSI, kita minta itu dikaji. Sehingga betul-betul objektif dan dapat terlaksana. Untuk pembinaan, tata kelola, dan prestasi persepakbolaan, tentu perlu dilakukan reformasi dalam segala hal, tapi ini harus dicabut dulu pembekuan itu. Semua pihak harus mendukung," tegas Sutan. *(sf) foto: azka/parle/hr.*



BERITA BERGAMBAR



Tim Panja Pembangunan Berkelanjutan BKSAP DPR berkunjung ke Rumah Apung Bangsring di Banyuwangi, Selasa (01/03/2016) foto : M.Husen/Parle/HR



Tim Panja Pembangunan Berkelanjutan BKSAP DPR Menanam Pohon Cemara Laut, Selasa (01/03/2016) foto : M.Husen/Parle/HR



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Masjid Menara Kudus dan Makam Kanjeng Sunan Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (24/02/2016) foto : Iwan Armanias/Parle/HR



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendis saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (26/02/2016) foto: Naefuroji/Parle/HR